

Pabrik Gula Pandjie Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Pada Tahun 1998 – 2008

The Sugar Factory Pandjie In Economy and Sosial Condition Of Panji Subdistrict Situbondo Regency 1998 – 2008

Rima Utari dan Edy Burhan Arifin, SU
Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember

Jl. Kalimantan No.38 Jember

Email rima_u@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengungkapkan Pabrik Gula Pandjie di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 1998-2008. Dalam penggarapan penelitian ini digunakan metode sejarah Sosial Ekonomi yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pabrik Gula Pandjie mengalami penurunan lahan setelah adanya Inpres No 5 Tahun 1998 yang berisi tentang masalah kebebasan pada petani untuk menanam komoditi sesuai dengan UU. 12/1992. Sehingga Pabrik Gula Pandjie berupaya untuk meningkatkan penurunan lahan dengan cara mengadakan program KKPE Tebu Rakyat (Kredit Ketahanan Pangan & Energi) dan IPL (Imbalan Pengguna Lahan). Pabrik Gula Pandjie mempunyai pengaruh sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar, adanya kesempatan kerja dan perubahan pola pikir masyarakat.

Kata kunci: pabrik gula pandjie , lokal, perubahan sosial ekonomi, tenaga kerja.

Abstrack

The aim of this research is to analyze, to describe, and to see the Pandjie sugar factory of in the Panji district, Situbondo regency 1998-2008. In executing the research, the historical method is employed, by making a use of written an oral sources on the subject matter. The result of this research shows that the Pandjie sugar factory found the land reduction after the presidential directive No. 5, 1998 contianing the freedom for the farmer to plant the commodity appropriated with UU.12/1992, so the Pandjie sugar factory seeks to increase the land by the program of KPPE citizen sugar cane (Energy and Food Security Credit) and IPL (the repayment of land use). The sugar factory of Pandjie had impacted on the socio-economi conditions of the surrounding society for the people surrounding that place for instance. There are many job vacancies and also change their pattern of thought.

Keywords: The Pandjie sugar factory, local, the economy social change, workers

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya berada di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian pokok dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris yang berbasis pada ekonomi pertanian (Barid Hardiyanto, 2005:3). Perubahan pertanian mempunyai pengaruh pada peningkatan ekonomi, tetapi hal ini membawa dampak

pada perindustrian dan masalah sosial (Kabul Santoso et al, 1996:74). Dinamakan pembanguna selama ini telah membawa keberhasilan berbagai aspek kehidupan. Terpenuhinya kebutuhan pokok yang semakin seimbang antara industri dan pertanian merupakan keberhasilan dari sektor pertanian, namun disisi lain masih diwarnai berbagai masalah dan tantangan. Cacatan penting dalam keberhasilan sector pertanian adalah meningkatnya komoditas tanaman pangan dan meningkatnya komoditas lainnya, seperti

komoditas perkebunan yang telah dikembangkan oleh orang-orang Belanda (Rudi Wibowo, 2002:2).

Perkebunan merupakan aspek terpenting dalam sistem perekonomian Indonesia, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk penyediaan komoditi-komoditi yang laku dipasar dunia. Sistem perkebunan merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan komoditi sesuai yang di inginkan, terutama untuk komoditi ekspor (William. J. O Malley, 1988:174). Modernisasi yang dikembangkan oleh kapitalis agraris Barat melalui sistem tanam paksa telah menciptakan sistem perekonomian baru, yaitu system perekonomian dualistik. Tipe perekonomian ini disatu sisi lain berorientasi pada penemuan kebutuhan ekspor, tapi disisi lain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan (Sartono Kartodirdjo, 1991:3).

Selain itu industri perkebunan besar telah memainkan peranan penting dalam perekonomian di Hindia Belanda pada kurun waktu 1830. Perkebunan ini berskala besar berawal dari sistem *culuturstelsel* (tanam paksa) yang diterapkan oleh Gubernur Jendral *Johannes Van Den Bosch*, yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu dan nila (Sartono Kartodirdjo, 1991:73). Sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat bukan dalam bentuk uang, tetapi berupa hasil tanaman pertanian, dengan demikian pemerintah dapat mengumpulkan produksi tanaman ekspor yang diperlukan yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia (Murbiyanto, 1992:20). Dalam sistem ini pemerintah Kolonial Belanda memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman komoditi ekspor, tanaman yang diwajibkan salah satunya adalah tanaman tebu yang dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi.

Sistem tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka dahulu lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun di pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaannya system tanam paksa, yang mengharuskan penduduk desa untuk menyerahkan sebagian tanah pertaniannya gagar ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa menyewa tanah milik penduduk oleh pemerintah kolonial secara paksa. Dengan demikian hasil produksi tanaman ekspor bertambah. Hal ini mengakibatkan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Hindia Belanda di kemudian hari.

Tanam paksa yang mulai diterapkan pada tahun 1830, secara bertahap akhirnya dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Namun, mengingat bahwa tujuan yang ingin dicapai pemerintah Belanda untuk

mendapatkan keuntungan dari tanah jajahan, maka penghapusan sistem tanam paksa diikuti dengan kebijakan baru, yaitu politik pintu terbuka. Kebijakan baru ini berawal dengan dikeluarkannya Undang – Undang Agraria 1870.

Sistem ekonomi liberal beserta kapitalisme secara lambat laun, tetapi terus menerus menunjukkan garis progresif peta pertanian pulau Jawa dan bagian utara Sumatra. Memang banyak pabrik gula di daerah dataran rendah dengan persawahan, seperti lembah sungai Brantas bagian hilir, didirikan pada tahun 1880-an dan juga pabrik gula di Karesidenan Besuki, Kelurahan Mimbaan yaitu Pabrik Pandjie didirikan pada tahun 1884 oleh perusahaan swasta Belanda yang bernama NV Tiedeman Van Kerchem. Berdirinya pabrik gula Pandjie tersebut tidak terlepas dari pengaruh Politik Liberal (pintu terbuka) bangsa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Disamping itu berdirinya pabrik gula ini didukung oleh berbagai sarana: Dam Sluice, saluran irigasi, jalan raya, jalan kereta api, dan dermaga pelabuhan. Untuk pekerjaan ini, pemerintah Hindia-Belanda kembali mengarahkan tenaga rakyat dengan sistem kerja rodi, yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Lebih-lebih saat perdagangan hasil tanaman ekspor mulai menurun, karena harga pasar dunia jatuh karena daerah-daerah Eropa mulai menanam tebu dan memproduksi gula.

Terkait dengan jatuhnya harga pasar dunia atau yang disebut masa depresi dunia sekitar tahun 1930-an telah mempengaruhi jalannya industri gula Indonesia. Seluruh perusahaan perkebunan telah merasakan dampak depresi tersebut, sebagai akibatnya dampak depresi ekonomi dunia, pabrik gula Pandjie tetap bertahan beroperasi dengan menanam seluruh lahan yang telah diberi izin untuk menanam tebu dengan jumlah 2300 bau (Nawiyanto, 2008:80) dan menghasilkan gula berjenis SHS (*Superievr Hoofd Suiker*) berjumlah 76.797 ton. Sebuah asumsi mengatakan, bertahannya pabrik gula terus memproduksi serta ditutupnya pabrik gula pada masa krisis berkait erat dengan manajemen strategi perusahaan. Manajemen yang dimaksud agar organisasi menjadi solid mampu menampilkan kinerja tinggi. Oleh karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat evektifitas dan produktifitasnya makin lama makin tinggi (Abraham Nurcahyo,2009:10).

Dewasa ini, peran pabrik gula lebih mandiri dan terdesentralisasi. Hal ini terjadi seiring dengan dilepaskannya intervensi pemerintah dalam kebijakan harga gula nasional. Semula, produksi gula dari pabrik gula dibeli dan didistribusikan oleh BULOG berdasarkan KEPPRES no. 43 tahun 1971, dan dipertegas lagi oleh SK menteri perdagangan dan koperasi no. 122/KP/III/1981 yang menetapkan

BULOG sebagai pembeli tunggal seluruh produksi dalam negeri.

Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Perubahan Ketentuan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 06/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Pemberian Premi Mutu Tebu Bagi Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 07/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Penetapan Harga Tetes Bagian Petani Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 04/SK/Mentan/Bimas/IV/1992 tentang Ketentuan Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah di Pabrik Gula. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini mencakup tiga hal, yaitu pertama, peningkatan secara keseluruhan produksi gula; kedua, peningkatan partisipasi rakyat; dan ketiga, peningkatan produktivitas per hektar.

Artikel ini berkaitan dengan keberadaan perkebunan yang berpengaruh kuat terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan, dengan menguraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah berdirinya, perkembangan perkebunan, pengaruh perkebunan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Panji Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang ditetapkan dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana perkembangan Pabrik Gula Pandjic setelah dikeluarkan Inpres No 5 Tahun 1998? (2) Langkah apa saja yang ditempuh oleh Pabrik gula Pandjic sehingga agar tetap bisa eksis beroperasi? (3) Bagaimana pengaruh sosial-ekonomi Pabrik Gula Pandjic terhadap masyarakat sekitar?

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah pendekatan sosiologi-ekonomi. Pendekatan sosiologi-ekonomi yaitu suatu pendekatan yang menganalisis mengenai cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan atau perspektif analisis sosiologi. Sosiologi ekonomi dalam operasinya mengaplikasikan tradisi pendekatan sosiologi terhadap fenomena ekonomi (Sindung Haryanto, 2011: 18). Landasan teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial, berkaitan dengan (1) sikap dan motivasi masyarakat, (2) ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan (Mudjia Rahardjo, 2007: 36-37). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang meliputi lima tahap yaitu; pemilihan topik,

pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, historiografi. (Kuntowijoyo, 2005: 90).

Lingkup spasial yang ditentukan dalam artikel ini adalah Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Desa Kecamatan merupakan tempat keberadaan Pabrik gula Pandjic ekaligus tempat dimana para pekerja perkebunan Panji tinggal. Lingkup temporal atau batasan waktu yang diambil yaitu dari tahun 1998-2008. Alasan penulis mengambil tahun 1998 yaitu bertepatan dengan keluarnya Intruksi Presiden No.5 Tahun 1998.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perkebunan pada lahan tetap, telah berlangsung di Indonesia berabad-abad lamanya. Usianya pun cukup lama, yaitu berkisar antara 10 sampai 50 tahun, bahkan lebih. Panjangnya usia perkebunan dikarenakan sekali dibangun di suatu tempat, kebun dapat berlangsung secara terus-menerus dan tidak memerlukan sistem irigasi yang ribet dan teknologi yang berlebihan. Sama halnya dengan keberadaan Perkebunan Blawan di Desa Kalianyar, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Apabila ditinjau dari segi historis, keberadaan Perkebunan Blawan sudah cukup tua.

Berawal pada tahun 1830, ketika Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia, dan mendapat tugas pertama yang sangat mendesak, yaitu meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai oleh pemerintah sebelumnya. Tugas tersebut harus segera dilaksanakan oleh Johannes van den Bosch karena perekonomian Belanda sedang terbengkalai dengan menerapkan sistem tanam paksa.

Seiring dengan dilaksanakannya kebijakan tanam paksa di Indonesia, kaum pribumi mulai dikenalkan dengan aneka tanaman perkebunan yang mempunyai nilai jual tinggi dan merupakan tanaman komoditi ekspor, misalnya kopi, tebu, indigo (bahan pewarna), tembakau, lada, teh dan kayu manis. Tanaman komoditi ekspor tersebut ditanam di berbagai wilayah Indonesia khususnya Jawa, hanya sebagian kecil di daerah luar Jawa. Daerah pelaksanaan sistem tanam paksa di Jawa, misalnya mencakup 18 wilayah karesidenan, antara lain: Karesidenan Banten, Priangan, Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri (N.D Retnandari, 1991: 15). Pelaksanaan kebijakan sistem tanam paksa ini, tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial, dalam kenyataannya penerapan sistem tanam paksa sangat membatasi dan menekan kaum pribumi, sehingga tidak ada perkembangan yang bebas dari

sistem pasar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum pribumi.

Pelaksanaan tanam paksa di Situbondo didasarkan atas pertimbangan beberapa potensi dan kondisi yang mendukung dalam pelaksanaan tanam paksa, diantaranya yaitu: kondisi geografis daerah Situbondo yang memiliki tanah subur sehingga merupakan modal utama dalam penyediaan bahan pertanian. Hal ini didukung dengan adanya bangunan *Dam Sluice*, yang fungsinya untuk membendung Kali Sampeyan dan memanfaatkan mengairi lahan-lahan kering di daerah Situbondo, Panarukan, Panji, Olean dan Kapongan. *Dam Sluice* dibangun bendungan untuk menyalurkan air Kali Sampeyan dengan dua saluran. Saluran pertama untuk mengairi lahan seluas 4.411 ha ke daerah Situbondo hilir Panarukan Utara, Wringin Anom, Olean, Pelean, dan Alas Malang. Sedangkan saluran kedua untuk mengairi lahan seluas 3.936 ha ke daerah Panji, Mangaran dan Kapongan. Tanaman komoditi ekspor yakni tebu memang memerlukan irigasi yang baik, dan dengan dibangunnya Dam Sluice maka produk tebu meningkat. Pada tahun 1835 produksi tebu hanya 76.450, tahun 1.840 menjadi 115.090 pikul pada tahun 1.849 menjadi 199.428 pikul. Demikian pula luas lahan penanaman tebu mengalami peningkatan. Pada tahun 1830 luas lahan yang ditanami hanya 700 bahu, pada tahun 1835 meningkat menjadi 3819 bahu, tahun 1840 seluas 4515 bahu dan pada tahun 1850 meningkat menjadi 6650 bahu. Dari data tersebut jelas menunjukkan peningkatan yang fantastis dan hal itu disebabkan karena dibangunnya beberapa dam dan perbaikan irigasi dan salah satunya *Dam Sluice* (Edy Burhan Arifin dan Nurhadi Sasmita, 2008:138).

Dibangunnya *Dam Sluice* tidak hanya meningkatkan produktifitas tebu, malainkan juga menaikkan taraf hidup rakyat yang lebih baik. Keadaan masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan sistem pemerintahan yang berdasarkan ikatan feodal dan ikatan desa. Perubahan sosial yang ditimbulkan Tanam Paksa antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk Situbondo yang semula berpenduduk jarang menjadi padat serta terjadi kenaikan standar kesejahteraan hidup masyarakat. Sedangkan perubahan ekonomi yang terjadi adalah beralihnya sistem ekonomi subsistensi ke sistem ekonomi komersial yang menyebabkan berkembangnya sistem ekonomi uang dalam masyarakat pedesaan serta masuknya modal swasta.

Industri gula merupakan sektor yang terpenting di wilayah ini, maka Belanda membangun Pabrik Gula Pandjie yang letaknya tepat berada ditengah kota berkelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Panji adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Situbondo. Kecamatan Panji mempunyai

aset besar sebagai penyokong dan kontributor utama bagi Kabupaten Situbondo, dengan pabrik gula besar peninggalan Kolonial Belanda mampu menampung karyawan dan menghasilkan devisa bagi negara dan kota.

PABRIK GULA PANDJIE DAN MASYRAKAT PANJI

Permasalahan industri gula di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sifat komoditi ini yang merupakan salah satu bahan pokok produksi, harga dan tata niaganya diatur oleh pemerintah. Permasalahan dalam industri gula tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pergulaan di Indonesia. Peran pemerintah sangat penting dalam suatu perusahaan, dengan demikian maka pemerintah perlu mendorong situasi usaha yang lebih kondusif, misalnya memberikan insentif dan kemudahan seperti jaminan keamanan, keringanan perpajakan, kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh dan konsistensi dalam penerapan kebijakan. Masalah pokok dalam pergulaan nasional adalah rendahnya produktifitas akibat rendahnya produktifitas, dan efisiensi industri gula nasional secara keseluruhan, dimulai dari pertanaman tebu hingga pabrik gula. Semakin menurunnya luas areal dan produktifitas tebu yang dihasilkan petani serta rendahnya produktifitas pabrik gula serta manajemen pabrik yang tidak efisien, adalah pemicu rendahnya produksi gula nasional secara umum.

Upaya peningkatan produksi gula untuk mencapai swasembada atau mengurangi impor dan stabilisasi harga seiring dengan perubahan status Indonesia menjadi Negara pengimpor gula adalah program intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman tebu. Program intensifikasi tebu terutama dilakukan di daerah yang secara historis mengusahakan tebu sawah, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan program pengembangan tebu tegal (M. Husein, 1995:87).

Demikian juga upaya yang dilakukan pabrik gula Pandjie sendiri dalam peningkatan produksi gula, melakukan program intensifikasi maupun ekstensifikasi yang memang program tersebut dari pemerintah dan berjalan sesuai prosedur. Intensifikasi yang dilakukan oleh pabrik gula Pandjie, melakukan penambahan biaya dengan membeli pupuk agar mendapatkan hasil produksi yang bagus sesuai target dengan rendemen yang tinggi sedangkan, ekstensifikasi perluasan lahan yaitu dengan menggunakan lahan tegalan/ yang disebut lahan kering. Untuk sawah mencapai 1.089 hektar sedangkan untuk tegalan 1.589 hektar pada tahun 1999 (Selayang Pandang PG, "Pandjie, 1999:7)

Program TRI telah berjalan selama 22 tahun (di mulai tahun 1975 sampai dengan tahun 1998) ini ternyata berjalan tidak efisien dengan kenyataan sistem TRI belum bisa mensejahterahkan kehidupan

petani seperti yang telah tercantum pada tujuan awal dibentuknya program TRI, sehingga program tersebut di cabut pemerintah dan mengeluarkan Inpres Nomer 5 Tahun 1998 yang berisi tentang pemberhentian sistem TRI yang berlaku sejak tanggal 21 Januari 1998. Inpres ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem budidaya tanaman, maka dipandang perlu memberikan peranan yang lebih besar kepada petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan serta cara pembudidayaannya. Pada akhirnya kebijakan tersebut dirasakan oleh pabrik gula Pandjie, karena pabrik secara tidak langsung mengalami kekurangan lahan areal karena petani enggan membudidayakan tanaman tebu sehingga pabrik mengalami kekurangan bahan baku.

Kondisi yang terjadi pada pabrik gula Pandjie yang beriringan dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari mulai penurunan produktivitas, kekurangan bahan baku dan kurangnya luas areal. Pabrik gula Pandjie sebagai pihak yang membutuhkan bahan baku yang paling penting dengan tersedianya tanaman tebu sampai saat ini pabrik gula Pandjie belum mampu mandiri untuk penyediaan bahan baku tebu. Untuk itu menjamin ketersediaan bahan baku secara lancar, pabrik gula Pandjie membutuhkan kerjasama yang erat dengan petani. Karena hanya dengan cara inilah kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Kerjasama yang erat terjalin bila dua belah pihak saling diuntungkan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pabrik gula Pandjie untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan produktivitas gula, yaitu memperluas lahan dengan cara pengadaan lahan yang melewati Imbalan Penggunaan Lahan (IPL) dan mempeluas lahan tebu rakyat dengan bekerjasama Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE). Langkah tersebut untuk memenuhi kekurangan yang dialami pabrik gula Pandjie. KPPE ini mempermudah petani untuk menanam tebu karena mendapatkan pinjaman uang, sehingga hal ini bisa memancing petani agar selalu mengusahakan budidaya tanaman tebu.

Perubahan utama yang terjadi berkaitan dengan penghentian program TRI adalah petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya, yang semula segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Dengan perubahan tersebut maka, hubungan antara petani tebu di wilayah kerja pabrik gula Pandjie berubah menjadi hubungan kemitraan (pola kemitraan). Pola kemitraan adalah sistem baru yang dilaksanakan setelah di cabutnya kebijakan TRI. Pola ini dibuat untuk mempertahankan minat petani agar tetap menanam tebu.

Pabrik gula Pandjie sebagai pihak yang membutuhkan bahan baku yang paling penting dengan

tersedianya tanaman tebu sampai saat ini pabrik gula Pandjie belum mampu mandiri untuk menyediakan bahan baku. Untuk itu menjamin tersedianya bahan baku secara lancar, pabrik gula sangat membutuhkan kerjasama yang erat dengan petani. Dengan cara seperti itu kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Kerjasama yang erat dapat terjalin bila kedua belah pihak saling menguntungkan. Jadi dalam pola kemitraan ini petani mempunyai posisi yang sejajar dengan pihak pabrik gula Pandjie.

Tahun 1999 pabrik gula Pandjie membutuhkan lahan sebanyak 1.223 ha, memang pada tahun tersebut petani sudah bebas tidak membudidayakan tanaman tebu sehingga pabrik sendiri kekurangan lahan, maka untuk alternatif lain pabrik menyewa lahan kepada petani. Pada tahun 2001 pabrik membutuhkan lahan seluas 1.179 ha dan tahun 2003 pabrik gula Pandjie membutuhkan lahan seluas 937 ha. Pengembangan areal lahan ini guna untuk mencapai kebutuhan bahan baku pabrik dan juga meningkatkan produktivitas tebu, maka pabrik gula Pandjie memperoleh lahan sewa. Kerjasama yang dilakukan oleh Pabrik Gula Pandjie dengan petani ternyata mendapat respon baik dari petani, petani lebih memilih menyewakan lahan dari pada membudidayakan tanaman tebu, atau tanaman lainnya seperti palawija dan padi. Kegiatan IPL ini dapat mensejahterahkan petani dalam perekonomiannya.

Tabel 1
Daftar Petani IPL

Tahun	Petani	Luas (Ha)	Harga/ha/tahun	Pendapatan
2005	H. Mansur	3,373	Rp. 4.963.026,-	Rp. 33.762.732,-
2006	H. Suhur	2,623	Rp. 4.540.026,-	Rp. 45.372.447,-
2007	Yasin	1,601	Rp. 5.248.214,-	Rp. 19.940.398,-
2008	H. Fais	0,640	Rp. 6.375.000,-	Rp. 47.302.114,-

Sumber: *Laporan Laba Rugi Per kebun Tahun 2005-2008*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa petani yang menyewakan lahan ke pabrik gula Pandjie pada tahun 2005 seluas 3.373 ha dengan harga per ha Rp. 4.963.026,- dengan pendapatan sebesar Rp. 33.762.732,- ha pada tahun 2006 seluas 2,623 ha dengan harga per ha sebesar Rp. 4.540.026,- dengan pendapatan Rp.45.372.447,-. Tahun 2007 seluas 1.601 ha dengan harga per ha Rp. 5.248.214,- dengan pendapatan sebesar 19.940.398,- tahun 2008 seluas 0.640 ha dengan harga per ha senilai Rp. 6.375.000,- dengan pendapatan Rp.47.302.114,-. Pelaksanaan kegiatan sewa menyewa ini untuk memenuhi

kebutuhan pabrik gula Pandjie dalam hal penyediaan lahan. Dapat terlihat pula dalam hal tersebut bahwa petani merasa mendapat keuntungan karena petani langsung mendapatkan uang sewa. Kerja sama ini juga saling menguntungkan bagi pihak dan pabrik.

Kebutuhan lahan dipabrik gula Pandjie dari petani memang membantu dalam pemenuhan kebutuhan lahan. Dibawah ini dapat dilihat daftar lahan IPL di pabrik gula Panjdjie.

Tabel 2
Daftar Lahan IPL di Pabrik Gula Pandjie Tahun 1999-2008

No.	Tahun	Luas (Ha)
1.	1999	1.758,949
2.	2000	1.563,503
3.	2001	1.133,242
4.	2002	1.034,512
5.	2003	1.140,072
6.	2004	1.245,079
7.	2005	1.329,554
8.	2006	1.268,361
9.	2007	935,784
10.	2008	627,410

Sumber: *Laporan Luas Lahan IPL Tahun 1999-2008*

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebutuhan lahan IPL di pabrik gula Pandjie dari tahun 1999-2008 mengalami penurunan. Tahun 1999 lahan lahan luas IPL mencapai 1.758,949 ha, tahun 1.563,503 ha, karena memang pada waktu tersebut para petani enggan menanam tebu sehingga pabrik gula Pandjie kurang lahan, untuk menutupi kekurangan tersebut pihak pabrik gula Pandjie menyewa lahan petani. Pada tahun 2001 lahan seluas 1.133,242 ha, tahun 2002 seluas 1.034,554 ha, dan tahun 2003 seluas 1.140,027 ha, mengalami penurunan karena uang sewa yang diberikan oleh pabrik gula Pandjie tidak sebanding dengan pendapatan petani, sehingga kebanyakan petani beralih ketanaman yang lain seperti padi, jagung dan palawija. Peningkatan luas areal lahan terjadi pada tahun 2004-2006 hal ini terjadi karena harga yang diberikan pabrik gula Pandjie terhadap uang sewa kepetani mulai kembali normal. Hal ini dipertimbangkan oleh pabrik gula Pandjie mengingat pada tahun sebelumnya pabrik kesulitan lahan karena uang sewa tidak sesuai dengan harga sewa, sehingga hal ini yang memicu peningkatan luas areal. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2007 dan 2008, di tahun tersebut kebutuhan hanya seluas 935,784 ha dan 627,410 ha. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa program dari pemerintah seperti

adanya program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu Rakyat. Bagi pabrik gula Pandjie sendiri program ini bisa membantu mengurangi lahan IPL, karena dari program tersebut petani mendapatkan pinjaman uang dari mulai biaya, pupuk, garap sampai tebang angkut. Sehingga sebagian dari petani tertarik untuk membudidayakan tebu tanpa disewakan.

Dalam meningkatkan produktifitas tebu pabrik gula Pandjie melakukan program kemitraan. Kemitraan dilakukan antara petani tebu dengan pabrik gula Pandjie. Program-program kemitraannya yaitu Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Program Imbalan Pengguna Lahan. Kemitraan ini terjalin karena petani tebu masih mengalami beberapa kendala seperti permodalan penggilingan hasil panen dan pemasaran hasil panen. Dengan adanya beberapa program kemitraan tersebut diharapkan produksi gula meningkat dan pendapatan petani bertambah.

PENYEDIAAN LAHAN PABRIK GULA PANDJIE

Prospek pengembangan tanaman perkebunan tidak hanya pada peningkatan komoditi tradisional, tetapi juga telah bergeser kearah penganekaragaman komoditi. Dengan demikian prospek pengembangan tanaman perkebunan mengacu pada penggunaan lahan. Upaya peningkatan produktivitas lahan tidak terbatas pada satu macam komoditi, tetapi disesuaikan dengan potensi sumber daya alam pada setiap wilayah. Komoditi lain yang dimaksudkan yaitu padi, jagung, tebu dan palawija.

Melakukan peningkatan produktivitas salah satunya dengan cara pelaksanaan sistem kemitraan, dalam sistem ini pabrik gula hanya berperan sebagai pengelola tebu menjadi gula dan petani berperan sebagai penyedia bahan baku (tebu). Ditinjau dari segi topografi dan iklim yang memadai, Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang berpotensi untuk tanaman perkebunan, yaitu tanaman tebu. Tanaman Tebu Rakyat (TR) di Kabupaten Situbondo mempunyai luas lahan rata-tara 6.175 ha yang terbesar pada 17 kecamatan, dengan rincian 2.500 ha dilahan sawah dan 3.675 ha di lahan kering Pabrik Gula Pandjie pada tahun 2000 memiliki luas wilayah kerja sekitar 2.500 ha dari keseluruhan daerah Situbondo, yang terbesar di 17 kecamatan, antara lain: (1) Kecamatan Situbondo 277 ha, (2) Mangaran 200 ha, (3) Besuki 270, (4) Arjasa 230 ha, (5) Kapongan 260 ha, (6) Panji 270 ha, dan dari luar kabupaten meliputi, Kabupaten Banyuwangi 250 ha, Jember 270 ha, dan Bondowoso 280 ha.

Tabel 3
Penyediaan Lahan Tanam Pada PG.Pandjie Tahun
1998-2008

Tahun	Luas Areal(ha)		Jumlah
	TS/Ha	TR/Ha	
1998	1.040,581	800.66,4	1.847,245
1999	1.836,586	809.686	2.646,272
2000	1.763,650	1.058,441	2.822,091
2001	1.563,503	1.222,559	2.786,06
2002	1.133,242	1.656,672	2.789,91
2003	1.035,512	1.443,797	2.479,309
2004	1.140,072	1.461,773	2.601,84
2005	1.245,079	1.735,455	2.981,543
2006	1.329,554	1.458,208	2.787,62
2007	1.268,361	1.957,050	3.225,411
2008	984,424	1.634,856	2.570,640

Sumber:PTPTN XI(Persero) Pabrik Gula Pandjie Situbondo.

Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai tahun 1998 sampai dengan 2008 luas lahan yang di kelola oleh pabrik gula Pandjie mengalami perubahan. Tahun 1998 penyediaan lahan seluas 1.847,245ha dengan TS 1.040,581 dan TR 800.66,4 dan tahun 1999 lahan TS seluas 1.836,586 ha, TR 809.686 ha jumlah lahan mengalami perubahan, hal ini karena menurunnya minat petani dalam menanam tebu. Penurunan minat petani ini dalam menanam tebu ini lebih disebabkan kerugian yang selalu dialami petani tebu karena adanya sistem birokrasi TRI yang rumit. Petani dalam memperoleh pinjaman. Artinya petani pada masa TRI belum bisa sejahterah, dan petani bisa terbebas dari kerumitan tersebut sejak tahun 1998 yakni dengan keluarnya Intruksi Presiden (Inpres) yang berisi tentang pencabutan TRI dan petani bebas menanam komoditi lain. Pada tahun 2000 luas lahan TS 1.763,650 ha, lahan TR 1.058,441 ha, tahun 2001 TS 1.563,502, TR 1.222,559, dan tahun 2002 luas lahan TS 1.333,242 ha lahan TR 1.656,672 ha, dari tahun tersebut dapat dilihat lahan TR maupun TS mengalami kenaikan lahan yang didukung dengan lahan sewa dari petani. untuk lahan TR petani membudidayakan tebu karena dapat pinjaman dari pabrik gula Pandjie, Sehingga untuk lahan TR mengalami kenaikan. Tahun 2003 lahan TS 1.035,512 ha, lahan TR 1.443,797 ha, tahun 2004 lahan TS 1.140,072 ha TR lahan 1.461,773 ha, tahun 2005 lahan TS seluas 1.245,079 ha sedangkan lahan TR seluas 1.735,455 ha, tahun 2006 lahan TS 1.329,554 ha, lahan TR seluas 1.458,208 ha,

tahun 2007 lahan TS seluas 1.268,361 ha, lahan TR 1.957,050 ha, tahun 2008 lahan TS seluas 984,424 ha sedangkan luas lahan TR mengalami peningkatan yaitu seluas 1.634,856 ha. Kenaikan luas lahan yang dimulai pada tahun 1999 sampai 2008 disebabkan tambahnya lahan petani untuk ditanami tanaman tebu, sebelumnya petani menanam tebu hanya sebagian dari lahan yang dimilikinya, namun sekarang petani tidak enggan lagi untuk menanam seluruh lahannya dengan tanaman tebu karena memang petani sudah mendapat keringanan untuk membudidayakan tebu yaitu dengan mendapatkan paket pinjam kredit dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu Rakyat.

Ketika produktifitas lahan (produksi tebu per hektar) naik, volume gula yang dihasilkan dari setiap ton tebu (rendemen) turun. Upaya pemerintah meningkatkan produktifitas melalui pemberian bantuan kepada petani untuk melakukan peremajaan tanaman tebu (program Bongkar *Ratoon*) dan subsidi pembelian mesin dan peralatan pabrik (revitalisasi pabrik gula), nampaknya kurang berpengaruh pada kinerja industri gula secara keseluruhan. Namun, dampaknya pada industri secara keseluruhan menjadi tidak terasa karena terbatasnya cakupan program. Selain itu, insentif untuk merevitalisasi mesin dan peralatan kurang mendapat sambutan dari pabrik gula yang nota bendnya adalah milik pemerintah sendiri. Perusahaan pabrik gula umumnya memiliki ketergantungan pada bahan baku tebu. Sementara produksi tebu adalah aktivitas yang bersifat spasial tau memerlukan lahan yang cukup, didalam keadaan semacam ini kegiatan produksi tebu dan gilingan dapat dilihat secara terpisah maupun dalam satu kesatuan pembuatan keputusan. Berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah hasil produksi gula pabrik gula Pandjie tahun 1998-2008;

Langkah yang ditempuh oleh Pabrik gula Pandjie sehingga pada tahun 2008 mencapai peningkatan antara lain (1) pengaturan manajemen yang kuat dan sumber daya manusia yang tinggi maka akan mendapatkan hasil yang baik. Manajemen yang dipakai oleh pabrik gula Pandjie manajemen strategi. Manajemen yang dimaksudkan agar organisasi menjadi solid mampu menampilkan kinerja tinggi; (2) Pabrik gula Pandjie untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan produktifitas gula, yaitu memperluas lahan dengan cara pengadaan lahan yang melewati Imbalan Penggunaan Lahan (IPL) dan mempeluas lahan tebu rakyat dengan bekerjasama Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPPE). Langkah tersebut untuk memenuhi kekurangan yang dialami pabrik gula Pandjie. KPPE ini mempermudah petani untuk menanam tebu karena mendapatkan pinjaman uang, sehingga hal ini bisa memancing petani agar selalu mengusahakan budidaya tanaman tebu.

Kredit ketahanan Pangan & Energi (KKPE) Tebu Rakyat, tebu adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada petani peserta untuk keperluan pengembangan budidaya tebu, melalui kelompok tani atau koperasi yang bermitra dengan Mitra Usaha / Pabrik Gula. KKPE yang terjalin di Pabrik Gula Pandjje melalui kelompok tani atau Koperasi Petani Tebu Rakyat "Mitra Tani". Sesuai dengan fungsinya bahwa KPTR sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perkonomian pedesaan, maka dalam melaksanakan harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi Koperasi lebih mengutamakan pemberian layanan kepada anggotanya dari pada sekedar mencari untung. Adapun kegiatan pelayanan yang diberikan oleh KPTR adalah unit pengadaan pangan, unit simpan pinjam, unit penyediaan sarana produksi (*saprodi*) bagi pertanian dan perkebunan.

Daftar Pustaka

- Arief, Suwondi (Eds). *Pembangunan Lima Tahun Di Jawa Timur 1969-1988*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI:1999.
- Burhan Arifin, Edy dan Nurhadi Sasmita, et. al., *Quo Vadis Hari Jadi Kabupaen Situbondo*. Situbondo: Bappekab dan Kapyawisda Jatim, 2008
- Dibyoy, Prabowo. *Dalam Perjalanan Waktu*. Surabaya: Airlangga University Press, 1998.
- Dudung, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Kartasapoetra, A. G. *Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian*, Jakarta :Bina Aksara, 1988.
- Sartono, Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- . *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- . *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- . *Sejarah Perkebunan Di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1994.
- , dkk. *Sejarah Nasional Indonesia II: Jaman Kuno*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995.
- Kabul Santoso, dkk. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Lous Gottschalk. *Mengerti Sejarah*(Terj.) Nograho Notosusanto, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Melly G.Tan. "Masalah Perencanaan Penelitian," dalam Koentjraningrat, *Metode-Metode Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE, 1984
- Mubyarto, Damayanti, *Gula Kajian Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Nawiyanto. *The Development Of Platations In Jember: During The Late Colonial Period 1859 - 1942*. Yogyakarta: LEMBAH MANAH, 2008.
- . ("The Economy of Besuki in the 1930s Depression" dalam Peter Boomgaard dan Ian Brown (ed), *Weathening the Storm*. Singapore: Institute of Southeast Asean Studies, 2000
- . *Tranformaming The Frontier: Enviromental Change In a Region Of Java, Besuki 1870-1970* Yogyakarta: Lembah Manah, 2009
- N.J, Smelser. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Wirasari 1987.
- William J.O. Malley. *Perkebunan 1830-1840: Ikhtisar*, dalam Anne Both (ed.), *Sejarah ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES